



PEDOMAN

No : 011 / PW / 2004

Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
bidang jalan

Buku 2



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA WILAYAH

TERKENDALI

P R A K A T A

Dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dibidang prasarana jalan agar diperoleh hasil yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya diperlukan aturan yang berupa NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) di bidang prasarana jalan.

Dengan diterbitkannya buku **Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan** ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para perencana, pengawas maupun pelaksana mengenai pemantauan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan

Apabila dalam pelaksanaannya dijumpai kekurangan / kekeliruan dari pedoman ini, akan dilakukan penyempurnaan di kemudian hari.

Jakarta Oktober 2004

Direktur Jenderal Prasarana Wilayah



Hendrianto Notosoegondo

Daftar Isi

Prakata	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vi
1 Ruang Lingkup	1
2 Acuan Normatif	1
3 Istilah dan Definisi	2
4 Aspek-aspek Perencanaan Pengelolaan Lingkungan	3
4.1 Perencanaan Sistem Jaringan Jalan Yang Berwawasan Lingkungan	3
4.1.1 Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang	3
4.1.2 Pencegahan Dampak Lingkungan Sedini Mungkin	4
4.1.3 Dampak Sosial dan Konsultasi Masyarakat	7
4.1.4 Penyaringan Lingkungan	7
4.2 Perencanaan Pembangunan Jalan Yang Layak Lingkungan	14
4.2.1 Pra Studi Kelayakan	14
4.2.2 Pengadaan Tanah	15
4.2.3 AMDAL Sebagai Bagian Dari Studi Kelayakan	15
4.2.4 Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL	15
4.2.5 Penyusunan Kerangka Acuan UKL dan UPL	20
4.2.6 Pelaksanaan Studi ANDAL	20
4.2.7 Penilaian dokumen AMDAL	23
4.2.8 Penyusunan Dokumen UKL dan UPL	24
4.3 Desain dan Spesifikasi Teknis Pengelolaan Lingkungan	24
4.3.1 Rekomendasi RKL dan RPL atau UKL dan UPL	24
4.3.2 Pembuatan Desain dan Spesifikasi Teknis Yang Memasukkan Pertimbangan Lingkungan	28
4.3.3 Pencantuman Persyaratan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Dalam Dokumen Tender dan Dokumen Kontrak ...	30
4.4 Penyusunan Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali	30
4.4.1 Maksud dan Tujuan	30
4.4.2 Langkah-langkah Kegiatan	30
4.4.3 Survey Sosial-Ekonomi	30
4.4.4 Inventarisasi Tanah dan Aset di Atasnya	31
4.4.5 Konsultasi Masyarakat	31
4.4.6 Rencana Pemukiman Kembali	31
4.4.7 Jadwal Pelaksanaan	31
4.4.8 Pembiayaan	32
4.4.9 Koordinasi	32

5	Dokumentasi	32
5.1	Jenis Dokumen	32
5.2	Hasil Penyarangan AMDAL	32
5.3	Dokumen Konsultasi Masyarakat	32
5.4	Dokumen AMDAL	33
5.4.1	Kerangka Acuan ANDAL	33
5.4.2	Dokumen ANDAL, RKL dan RPL	34
5.4.3	Kadaluwarsa dan Batalnya Dokumen ANDAL, RKL dan RPL	34
5.4.4	Keterbukaan Informasi Tentang AMDAL	35
5.5	Dokumen UKL dan UPL	35
5.6	Dokumen LARAP	35
6	Pembiayaan	36
6.1	Biaya Penyarangan Proyek Yang Wajib Dilengkapi AMDAL atau UKL / UPL	36
6.2	Biaya Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL	36
6.3	Biaya Studi ANDAL atau UKL dan UPL	37
6.4	Biaya Penjabaran RKL/RPL atau UKL/UPL pada tahap Perencanaan Teknis	39
6.5	Biaya Penyusunan LARAP	39
6.6	Pengajuan Usulan Biaya	39
7	Koordinasi Antar Instansi Terkait	40
7.1	Pemrakarsa	40
7.2	Bapedalda	41
7.3	Bappeda	42
7.4	Masyarakat	42
7.5	Instansi (Stakeholder) Lainnya	43
7.6	Komisi Penilai AMDAL	43
7.7	Bagan Koordinasi Antar Instansi Terkait	44
8	Penutup	45

Daftar Lampiran

- Lampiran A: Pedoman Teknis Pemilihan Rute Jalan
- Lampiran B: Pedoman Teknis Konsultasi Masyarakat
- Lampiran C: Pedoman Teknis Penyaringan Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan yang Wajib Dilengkapi AMDAL atau UKL dan UPL
- Lampiran D: Pedoman Teknis Pengadaan Tanah untuk Bidang Jalan
- Lampiran E: Pedoman Teknis Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL Bidang Jalan
- Lampiran F: Pedoman Teknis Penyusunan ANDAL, RKL dan RPL Bidang Jalan
- Lampiran G: Pedoman Teknis Analisis Dampak Sosial Bidang Jalan
- Lampiran H: Pedoman Teknis Penilaian Dokumen AMDAL Bidang Jalan
- Lampiran I: Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen UKL dan UPL Bidang Jalan
- Lampiran J: Pedoman Teknis Penjabaran RKL dan RPL atau UKL dan UPL Bidang Jalan
- Lampiran K: Pedoman Teknis Perencanaan Lansekap Jalan
- Lampiran L: Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali untuk Bidang Jalan
- Lampiran M: Bagan Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Pelaksanaan Kajian Lingkungan Bidang Jalan
- Lampiran N: Bagan Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Bidang Jalan
- Lampiran O: Bagan Koordinasi antar Instansi Terkait dalam Perencanaan Penanganan Masyarakat Terasing untuk Bidang Jalan
- Lampiran P: Daftar Acuan Peraturan dan Perundang-undangan